

Analisis Alternatif Kebijakan Permasalahan Sanitasi Lingkungan Akibat Sampah Di RT 15 Kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang

Aulia Izlaini¹, Indah Khairunisya Damayanti², Bunga Mar'atus Soleha³, Teza Natasya Putri⁴

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

Email: aulia28desember@gmail.com; indahkhairunisya2007@gmail.com; maratussoleha2010@gmail.com; Tezanatasyaputri@gmail.com

Abstract. *Environmental sanitation problems caused by waste accumulation in RT 15, Lawang Kidul Village, remain an issue that affects public health, comfort, and environmental quality. The accumulation of waste in dams and drainage channels causes water flow blockages, leading to flooding and waterlogging during the rainy season. This study aims to analyze policy alternatives in addressing environmental sanitation problems caused by waste accumulation in RT 15, Lawang Kidul Village. The research used a qualitative method through field observations, interviews with the neighborhood head and local residents, as well as literature and regulatory studies related to waste management. The results show that sanitation problems are influenced by low public awareness, lack of participation in community clean-up activities, limited waste management facilities, and waste carried from other areas through the dam flow. Based on the analysis, three policy alternatives were identified, namely status quo, strengthening education, participation and sanctions, and providing facilities along with strengthening waste management systems. The most recommended policy alternative is strengthening education, participation, and sanctions because it is considered more realistic, effective, and capable of encouraging sustainable behavioral change within the community. Policy implementation requires cooperation between the community, village government, neighborhood authorities, and related agencies in order to improve environmental sanitation conditions.*

Keywords: *Environmental Sanitation, Community Participation, Public Policy, Enviroment, Waste Management*

Abstrak. Permasalahan sanitasi lingkungan akibat penumpukan sampah di RT 15 Kelurahan Lawang Kidul masih menjadi persoalan yang berdampak pada kesehatan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan masyarakat. Penumpukan sampah di saluran dam dan drainase menyebabkan penyumbatan aliran air sehingga memicu genangan dan banjir saat musim hujan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan dalam mengatasi permasalahan sanitasi lingkungan akibat sampah di RT 15 Kelurahan Lawang Kidul. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik observasi lapangan, wawancara dengan Ketua RT dan masyarakat, serta studi literatur dan regulasi terkait pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan sanitasi dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya partisipasi dalam kegiatan gotong royong, keterbatasan sarana pengelolaan sampah, serta adanya sampah kiriman dari wilayah lain melalui aliran dam. Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga alternatif kebijakan yaitu status quo, penguatan edukasi, partisipasi dan pemberian sanksi, serta penyediaan sarana dan penguatan pengelolaan sampah. Alternatif kebijakan yang paling direkomendasikan adalah penguatan edukasi, partisipasi, dan pemberian sanksi karena dinilai lebih realistis efektif, dan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Implementasi kebijakan memerlukan kerja sama antara masyarakat, pemerintah kelurahan, perangkat RT, dan instansi terkait agar kondisi sanitasi lingkungan dapat menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Lingkungan, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Sanitasi Lingkungan

Received Feb 12, 2026; Revised Apr 22, 2026; Accepted Jun 03, 2026

* Aulia Izlaini: Email: aulia28desember@gmail.com

PENDAHULUAN

Sanitasi lingkungan masih menjadi salah satu persoalan yang sering dihadapi masyarakat dan memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan serta kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Sanitasi yang baik tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat, kenyamanan permukiman, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Salah satu permasalahan sanitasi yang masih sering ditemukan di berbagai wilayah adalah penumpukan sampah pada saluran drainase dan lingkungan permukiman, yang dapat menyebabkan penyumbatan aliran air, genangan, serta meningkatkan risiko penyakit.

Di Indonesia, permasalahan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan yang terus dihadapi, baik di kawasan perkotaan maupun permukiman masyarakat. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun, meskipun regulasi tersebut telah diberlakukan, praktik pembuangan sampah sembarangan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dibuat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kondisi lapangan.

Salah satu kondisi tersebut ditemukan di RT 15 Kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang, di mana masih terjadi penumpukan sampah pada saluran dam dan drainase lingkungan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, pada beberapa titik saluran dam dan drainase ditemukan tumpukan sampah seperti plastik, daun kering, dan limbah rumah tangga yang menghambat aliran air. Kondisi ini sering menyebabkan genangan ketika curah hujan meningkat. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, kondisi ini juga menimbulkan bau tidak sedap dan berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan sebagian warga yang masih membuang sampah sembarangan. Selain itu, adanya sampah kiriman dari wilayah lain juga memperburuk kondisi di area tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak lingkungan, seperti pemberian himbauan kepada masyarakat dan pelaksanaan kegiatan gotong royong secara berkala. Namun, upaya tersebut belum mampu menyelesaikan masalah secara optimal karena masih rendahnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga erat kaitannya dengan efektivitas implementasi kebijakan serta koordinasi antar aktor dalam pengelolaan sampah.

Temuan di lapangan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas persoalan sanitasi dan pengelolaan sampah di lingkungan permukiman. Dickals, Sintorini, dan Purwaningrum (2023) menjelaskan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah berkontribusi terhadap buruknya kondisi sanitasi lingkungan. Penelitian Sekarningrum, Nurwati, dan Wibowo (2024) juga menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan serta keterbatasan pengelolaan sampah di kawasan permukiman menyebabkan masalah sanitasi terus berulang. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan sanitasi sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, dukungan fasilitas, dan implementasi kebijakan yang efektif. Berbagai penelitian memang telah banyak membahas sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Namun, penelitian yang fokus pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan pada tingkat lingkungan RT masih belum banyak ditemukan. Padahal, permasalahan pada tingkat lokal sering kali memiliki karakteristik yang berbeda dan membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor

yang menyebabkan kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan optimal pada tingkat lingkungan.

Dalam kasus pengelolaan sampah di RT 15 Kelurahan Lawang Kidul, keempat faktor tersebut dapat dilihat dari masih terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya fasilitas pendukung, partisipasi warga yang belum optimal, serta koordinasi antar pihak yang masih perlu diperkuat. Melalui teori ini, penelitian diharapkan dapat membantu mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi yang lebih tepat.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa pengelolaan sampah di RT 15 Kelurahan Lawang Kidul belum berjalan secara optimal sehingga masih terjadi penumpukan sampah yang berdampak pada sanitasi lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penyebab utama permasalahan, mengevaluasi alternatif kebijakan yang dapat diterapkan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah setempat maupun masyarakat dalam memperbaiki pengelolaan sampah dan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi permasalahan sanitasi lingkungan akibat sampah di RT 15 Kelurahan Lawang Kidul serta merumuskan alternatif kebijakan yang sesuai. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi sosial masyarakat, hambatan implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan sampah di tingkat lokal (Creswell & Creswell, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta kajian literatur dan regulasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengidentifikasi kondisi sanitasi lingkungan, seperti penumpukan sampah di saluran dam dan drainase, penyumbatan aliran air, serta genangan yang terjadi saat musim hujan. Wawancara dilakukan terhadap dua informan utama, yaitu Ketua RT 15 yang diwawancarai dua kali perihal identifikasi masalah dan rekomendasi kebijakan, dan salah satu warga yang terdampak langsung oleh permasalahan sanitasi. Pemilihan informan didasarkan pada tingkat keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap kondisi lingkungan setempat. Penelitian ini juga menggunakan identifikasi regulasi melalui analisis terhadap kebijakan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ini memfokuskan analisis sesuai dengan kebutuhan dan disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran secara detail, dan setelah itu dilanjutkan pada tahap berikutnya untuk disajikan dengan gambaran yang lebih mudah dipahami. Data kemudian dipaparkan secara detail dan singkat dan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah (Purnamasari & Afriansyah, 2021). Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen pendukung.

Dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, penelitian ini menggunakan pendekatan *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) untuk mengevaluasi alternatif kebijakan secara sistematis berdasarkan beberapa kriteria, yaitu efektivitas (50%), efisiensi (30%), keadilan (20%). Setiap alternatif dinilai menggunakan skala 1–5, di mana skor terendah menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat rendah dan skor tertinggi menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat tinggi. Skor pada masing-masing kriteria kemudian dikalikan dengan bobot yang telah ditetapkan untuk memperoleh nilai terbobot total sebagai dasar dalam menentukan alternatif kebijakan yang paling tepat.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III untuk menganalisis hambatan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Teori ini menekankan empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Mawardani & Arif, 2023). Keempat aspek tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami penyebab belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di RT 15 serta sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan sanitasi lingkungan di RT 15 Kelurahan Lawang Kidul masih menjadi masalah yang cukup serius. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga serta Ketua RT, ditemukan adanya penumpukan sampah di saluran dam dan drainase yang menyebabkan aliran air tersumbat sehingga menimbulkan genangan dan banjir saat musim hujan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, kurangnya partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong, keterbatasan sarana pengelolaan sampah, serta adanya sampah kiriman dari wilayah lain melalui aliran dam. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan menjadi kotor, berbau tidak sedap, dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil analisis alternatif kebijakan, terdapat tiga alternatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan sanitasi di RT 15 Kelurahan Lawang Kidul, yaitu alternatif status quo, penguatan edukasi, partisipasi dan pemberian sanksi, serta penyediaan sarana dan penguatan pengelolaan sampah. Alternatif status quo mudah dilaksanakan karena tidak membutuhkan biaya tambahan, namun belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Alternatif penguatan edukasi, partisipasi, dan pemberian sanksi dilakukan melalui penyuluhan, kampanye kebersihan lingkungan, kegiatan gotong royong rutin, pembentukan kelompok sadar lingkungan, serta pemberian sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Menurut Meilala & Meliala (2026) edukasi lingkungan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sehingga dapat membentuk perilaku peduli lingkungan secara berkelanjutan. Sementara itu, alternatif penyediaan sarana dan penguatan pengelolaan sampah berfokus pada penyediaan tempat sampah terpilah, perbaikan saluran air, perbaikan TPS, serta penguatan sistem pengangkutan sampah secara rutin. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi antar pihak agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Mariane et al., 2025).

Berdasarkan ketiga rekomendasi alternatif yang telah diidentifikasi, maka dilakukanlah perbandingan kelebihan dan kekurangan alternatif kebijakan tersebut.

Tabel 1. Kekurangan dan Kelebihan Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Kelebihan	Kekurangan
Status Quo	- Tidak memerlukan biaya tambahan maupun sumber daya baru - Mudah dilaksanakan karena sudah berjalan - Tidak memerlukan perubahan kebijakan atau koordinasi tambahan	- Tidak mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh - Penumpukan sampah berpotensi terus terjadi - Risiko dampak kesehatan dan lingkungan tetap tinggi - Tidak memberikan solusi jangka panjang
Penguatan Edukasi, Partisipasi, dan Pemberian Sanksi	- Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap kebersihan - Biaya jangka panjang rendah dan tidak memerlukan penyediaan sarana fisik - Dapat memperkuat solidaritas dan gotong royong masyarakat - Memberikan dampak jangka panjang melalui perubahan perilaku	- Keberhasilan bergantung pada partisipasi masyarakat - Membutuhkan waktu untuk melihat hasilnya - Tidak langsung mengatasi masalah sarana pengelolaan sampah
Penyediaan Sarana dan Penguatan Pengelolaan Sampah	- Mengatasi masalah secara langsung dan sistematis - Memudahkan masyarakat dalam membuang sampah dengan benar - Berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kebersihan lingkungan - Efektif untuk solusi jangka panjang	- Membutuhkan anggaran yang cukup besar - Memerlukan koordinasi dengan pihak kelurahan atau dinas terkait - Membutuhkan pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan - Lahan yang sempit untuk membangun TPS baru

Berdasarkan tabel analisis kelebihan dan kekurangan alternatif kebijakan, dapat disimpulkan bahwa setiap alternatif memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Alternatif status quo unggul dari sisi kemudahan pelaksanaan dan efisiensi biaya, tetapi kurang

efektif dalam menyelesaikan masalah sanitasi secara berkelanjutan. Alternatif penguatan edukasi, partisipasi, dan pemberian sanksi dinilai lebih realistis karena mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat partisipasi warga dengan biaya yang relatif rendah. Sementara itu, alternatif penyediaan sarana dan penguatan pengelolaan sampah memiliki potensi dampak yang lebih besar terhadap kebersihan lingkungan, namun membutuhkan dukungan anggaran, sumber daya, dan koordinasi yang lebih besar dalam pelaksanaannya.

Pembobotan Kriteria Menggunakan Multi Criteria Decision Analysis (MCDA)

Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) merupakan teknik pengambilan keputusan multi-variabel. Tahap pertama dalam MCDA adalah menentukan alternatif-alternatif yang akan dipilih, yang dalam konteks penelitian merupakan skenario-skenario kebijakan yang dibandingkan. Setiap alternatif tersebut dapat terdiri atas beberapa kriteria, sehingga MCDA juga melibatkan multi-kriteria dalam proses penilaiannya (Warlina et al., 2011), karena melibatkan banyak kriteria, tahap selanjutnya adalah melakukan pembobotan pada masing-masing kriteria atau memberikan nilai berdasarkan tingkat kepentingannya. Tahap terakhir adalah memproses nilai tersebut untuk menentukan peringkat setiap alternatif. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya dalam menghasilkan alternatif terbaik dengan mempertimbangkan seluruh kriteria yang melekat pada masing-masing alternatif secara sistematis dan terukur. Penentuan bobot kriteria dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi permasalahan, dampak terhadap tujuan kebijakan, serta relevansi terhadap akar masalah yang telah diidentifikasi.

Tabel 2. Pembobotan Kriteria

Kriteria	Bobot	Persentase
Efektivitas	0,50	50%
Efisiensi	0,30	30%
Keadilan	0,20	20%

Kriteria efektivitas diberikan bobot paling besar, yaitu 0,50 (50%), karena permasalahan utama terletak pada belum optimalnya pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan sampah. Intervensi kebijakan harus mampu secara nyata mengurangi penumpukan sampah, mencegah penyumbatan saluran air, serta menekan risiko banjir dan penyakit berbasis lingkungan. Kriteria efisiensi diberikan bobot sebesar 0,30 (30%) dengan pertimbangan bahwa penggunaan sumber daya tetap perlu diperhatikan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Namun demikian, efisiensi tidak ditempatkan sebagai prioritas utama karena kebijakan yang murah tetapi tidak efektif tetap tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara substansial. Kriteria keadilan diberikan bobot sebesar 0,20 (20%) karena terdapat kelompok rentan yang terdampak lebih besar serta adanya distribusi beban lingkungan yang tidak sepenuhnya berasal dari masyarakat setempat. Meskipun penting, aspek keadilan diposisikan setelah efektivitas dan efisiensi karena fokus utama kebijakan adalah memastikan permasalahan sanitasi dapat diselesaikan secara nyata terlebih dahulu.

Evaluasi Alternatif Kebijakan

Dari ketiga alternatif kebijakan yang telah dirumuskan, dilakukan evaluasi alternatif kebijakan untuk menilai dan membandingkan setiap alternatif berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Alternatif kebijakan yang dirumuskan berupa alternatif status quo, penguatan edukasi, partisipasi, dan pemberian sanksi, serta penyediaan sarana dan penguatan pengelolaan sampah. Evaluasi dilakukan menggunakan *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) dengan mempertimbangkan dan melakukan pembobotan tiga kriteria utama

kemudian setiap alternatif akan diberi skor 0-2 dimana semakin tinggi skor maka semakin baik alternatif kebijakan tersebut. Adapun indikator dari masing-masing skor terhadap kriteria tersebut akan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Indikator Penilaian Kriteria

Skor	Efektivitas	Efisiensi	Keadilan
1	Sangat rendah. Kebijakan tidak memberikan dampak nyata terhadap pengurangan masalah.	Sangat rendah. Membutuhkan biaya besar dengan hasil yang tidak sebanding.	Sangat rendah. Manfaat hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat.
2	Rendah. Kebijakan memberikan sedikit dampak, namun permasalahan utama masih dominan terjadi.	Rendah. Penggunaan sumber daya cukup besar namun hasil masih kurang optimal.	Rendah. Manfaat belum merata dan masih banyak kelompok yang belum terjangkau.
3	Sedang. Kebijakan cukup membantu mengurangi masalah, tetapi belum optimal.	Sedang. Penggunaan sumber daya cukup seimbang dengan hasil yang diperoleh.	Sedang. Manfaat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, namun belum sepenuhnya merata.
4	Tinggi. Kebijakan mampu mengurangi Sebagian besar permasalahan secara nyata.	Tinggi. Menggunakan sumber daya relatif efisien dengan hasil yang baik.	Tinggi. Manfaat kebijakan dirasakan hampir seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan
5	Sangat tinggi. Kebijakan efektif dan mampu menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.	Sangat tinggi. Menghasilkan dampak signifikan dengan penggunaan biaya dan sumber daya yang minimal.	Sangat tinggi. Manfaat kebijakan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan.

Setelah indikator penilaian ditentukan, tahap berikutnya adalah menetapkan bobot pada setiap kriteria evaluasi. Pemberian bobot ini bertujuan untuk menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria dalam proses pengambilan keputusan, sehingga hasil penilaian alternatif kebijakan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan prioritas permasalahan. Skor yang diberikan pada setiap masing-masing alternatif akan dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan. Hasil tertinggi menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan.

Tabel 4. Hasil Pembobotan Alternatif Kebijakan

Kriteria	Bobot	Status Quo	Penguatan Edukasi, Partisipasi,	Penyediaan Sarana dan Penguatan
----------	-------	------------	---------------------------------	---------------------------------

			dan Pemberian Sanksi	Pengelolaan Sampah
Efektivitas	0,5	$2 \times 0,5 = 1$	$4 \times 0,5 = 2$	$3 \times 0,5 = 1,5$
Efisiensi	0,3	$3 \times 0,3 = 0,9$	$4 \times 0,3 = 1,2$	$2 \times 0,3 = 0,6$
Keadilan	0,2	$3 \times 0,2 = 0,6$	$5 \times 0,2 = 1$	$5 \times 0,2 = 1$
Total		2,5	4,2	3,1

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode MCDA, alternatif yang memperoleh skor tertinggi dan direkomendasikan, untuk mengatasi permasalahan sanitasi akibat penumpukan sampah di RT 15 Kelurahan Lawang Kidul adalah penguatan edukasi, partisipasi, dan pemberian sanksi. Alternatif ini dipilih karena dinilai paling optimal dalam menjawab akar permasalahan, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Dari sisi efektivitas, kebijakan ini mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Dari sisi efisiensi, pendekatan edukasi tidak membutuhkan biaya yang besar pada tahap awal sehingga lebih realistis untuk diterapkan. Sementara itu, dari sisi keadilan, manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang terdampak langsung oleh buruknya sanitasi lingkungan.

Alternatif ini lebih efektif dibandingkan alternatif status quo yang dinilai kurang efektif karena permasalahan sampah dan sanitasi tetap berpotensi terus terjadi tanpa adanya intervensi baru. dibandingkan alternatif penyediaan sarana dan penguatan pengelolaan sampah, alternatif edukasi dinilai lebih tepat sasaran karena permasalahan utama di wilayah tersebut bukan terletak pada kurangnya fasilitas, melainkan pada perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Penyediaan sarana baru juga menghadapi kendala berupa keterbatasan lahan serta kebutuhan anggaran yang lebih besar seperti biaya pembangunan dan penyediaan sarana baru. Sebaliknya, pendekatan edukasi, partisipasi, dan pemberian sanksi relatif lebih efisien karena dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih rendah namun tetap mampu memberikan dampak jangka panjang melalui perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, alternatif ini dipandang sebagai pilihan kebijakan yang paling optimal, realistis, dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan sanitasi lingkungan akibat sampah.

Strategi Implementasi

Implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap agar pelaksanaannya lebih terarah dan berkelanjutan, yaitu:

1. Jangka Pendek (0–3 bulan). Fokus pada kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, penyusunan aturan sanksi, serta penguatan koordinasi antara RT, kelurahan, dan dinas terkait.
2. Jangka Menengah (3–12 bulan). Dilakukan penguatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok sadar lingkungan, pelaksanaan gotong royong rutin, penerapan sanksi, serta monitoring perubahan perilaku masyarakat.
3. Jangka Panjang (>1 tahun). Difokuskan pada evaluasi berkala dan penguatan sistem pengelolaan sampah agar dapat berjalan secara mandiri, konsisten, dan berkelanjutan.

Koordinasi antar institusi juga diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Ketua RT berperan sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, dan pengorganisasian kegiatan masyarakat. Kader lingkungan berperan memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga. Sementara itu, pihak kelurahan, kecamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertugas memberikan dukungan

administratif, koordinasi, monitoring, serta penyediaan sarana pendukung program. Koordinasi antar instansi penting untuk menciptakan kesatuan tindakan agar pelaksanaan program berjalan lebih terarah dan efektif (Eliza & R, 2025).

Pendekatan berbasis edukasi dan partisipasi masyarakat juga telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah program Kawasan Bebas Sampah di Kota Bandung yang tertuju pada upaya pengurangan sampah melalui pengelolaan sampah secara mandiri, meliputi kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah khususnya pada studi kasus yang dilakukan Djulianti & Ainun (2018) di RW 7 Kebon Pisang. Berdasarkan hasil kajian, dengan adanya program ini total timbunan sampah yang berkurang sebesar 16,43% sejak 2015. Keberhasilan program serupa berbasis edukasi dan partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis edukasi dan keterlibatan masyarakat memiliki potensi dalam mengurangi permasalahan sampah di lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan secara optimal serta mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Permasalahan sanitasi lingkungan akibat penumpukan sampah di RT 15 Kelurahan Lawang Kidul disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, kurangnya partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong, keterbatasan sarana pengelolaan sampah, serta adanya sampah kiriman dari wilayah lain melalui aliran dam. Kondisi tersebut menyebabkan saluran air tersumbat, munculnya genangan saat hujan, serta menurunnya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA), alternatif kebijakan penguatan edukasi, partisipasi masyarakat, dan pemberian sanksi memperoleh skor tertinggi yaitu 4,2 dibandingkan alternatif status quo dengan skor 2,5 dan alternatif penyediaan sarana serta penguatan pengelolaan sampah dengan skor 3,1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dan partisipasi masyarakat dinilai lebih efektif dan realistis dalam mengatasi permasalahan sanitasi lingkungan secara berkelanjutan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena dilakukan dalam lingkup yang terbatas dan jumlah informan yang digunakan belum banyak, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya menggambarkan kondisi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta mengkaji implementasi kebijakan secara langsung agar hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan komprehensif.

REFERENSI

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dickals, E. P., Sintorini, M. M., & Purwaningrum, P. (2023). SANITASI LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KESEHATAN LINGKUNGAN. *INFOMATEK: Jurnal Informatika, Manajemen Dan Teknologi*, 25(2), 105–116. <https://doi.org/10.23969/infomatek.v25i2.9765>
- Djulianti, Y., & Ainun, S. (2018). ADANYA PROGRAM KAWASAN BEBAS SAMPAH IDENTIFICATION OF SOLID WASTE REDUCTION LEVEL WITH KAWASAN BEBAS SAMPAH PROGRAM PENDAHULUAN lingkungan menjadi salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi negara-negara Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah (RP. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 24(2), 43–60.
- Eliza, V., & R, S. H. N. (2025). KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KAWASAN TERTIP LALU LINTAS DI KOTA MEDAN. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(3), 603–615.
- Mariane, I., Gnagey, M. R., Karali, M. A. M. I., & Hardiyanti, E. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN ANTAPANI TENGAH KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 93–108.
- Mawardani, S. E., & Arif, L. (2023). PROGRAM PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI PASAR PUCANG ANOM KOTA SURABAYA DALAM PANDANGAN. *Journal Publicuho*, 6(2), 560–567.
- Meilala, L. A. B. S., & Meliala, N. A. A. S. (2026). Adinusa : Jurnal Pengabdian Program Edukasi Lingkungan Berbasis Komunitas Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Adinusa : Jurnal Pengabdian Inovasi Nusantara*, 1(1), 57–71.
- Purnamasari, A., & Afriansyah, E. A. (2021). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 207–222.
- Sekarningrum, B., Nurwati, N., & Wibowo, H. (2024). Sanitasi Lingkungan Di Wilayah Pemukiman Perkotaan (Kasus Pada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandung) SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi , Vol . 8 , No . 1 , Desember 2023 Sanitasi Lingkungan Di Wilayah Pemukiman. *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 8(1), 102–114.
- Warlina, L., Rusdiyanto, E., Sumartono, & Sawir, I. (2011). Penggunaan multi criteria decision analysis (mcda) untuk menentukan model alternatif kebijakan pendidikan lingkungan (studi kasus di sd tangerang selatan). *Universitas Terbuka Repository*.
- Pemerintah Kota Palembang. (2015). *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.